

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

# S O L U S I

Vol. 9 No. 1 Januari 2010

Perbedaan Penggunaan *Discriminant Function* dengan  
*Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)* dan  
Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi  
*Dyah Nirmala Arum Janie*

Pengaruh ROA, EPS, *Current Ratio*, DER dan Inflasi terhadap  
*Return Saham* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur  
di BEI Periode Tahun 2006-2008)  
*Widyani Anik, Dian Indriana T.L.*

Pentingnya Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan  
*Ardiani Ika S*

Pengaruh *Procedural Justice* dan *Distributive Justice* terhadap  
Tingkat Eskalasi Komitmen dalam Penganggaran Modal dengan  
*Self Esteem* sebagai Variabel Intervening (Studi Eksperimen)  
*Andi Irfan*

Aplikasi Konsep Dasar Permintaan Pasar terhadap Pemasaran Produk  
(Studi Kasus Pemasaran Produk Televisi VCD)  
*Edy Suryawardana*

Identifikasi Indikator Penilaian Kinerja Karyawan untuk  
Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (Studi di Universitas  
Jenderal Soedirman dalam Rangka Perubahan Status menjadi  
Badan Layanan Umum 2010)  
*Irianing Suparlinah, Puji Lestari*

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah  
*Unun Dian Anggraeni, Yohanes Suhardjo*

Efisiensi Market dan Implikasinya  
*Dian Indriana T.L.*

Upaya Mempertahankan UMKM di Tengah Persaingan CAFTA  
*Evi Nurhidayati, Andy Kridasusila*

Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia Menghadapi ACFTA  
*Dian Prawitasari*

## SOLUSI

Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis  
Terbitan 3 bulan sekali  
(Januari, April, Juli, Oktober)

**Penerbit :**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Pelindung :**  
**Rektor Universitas Semarang**

**Penanggungjawab .**  
**Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Dewan redaksi :**  
**Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE, ME (USM)**  
**Prof. Dr. Imam Ghozali M.Com, Hons.Akt (UNDIP)**  
**Prof. Supramono SE, MBA, DBA(UKSW)**  
**Prof. Dr. Dra. Sulastris ME. M.kom (UNISRI)**  
**Dr. Ir. Kesi Widjajanti SE MM (USM)**

**Redaktur Pelaksana :**  
**Andy Kridasusila SE MM**  
**Ardiani Ika S., SE MM Akt**  
**Adijati Utaminingsih SE MM**

**Sekretaris Redaksi :**  
**Amerti Irvin Widowati SE MSi Akt**

**Tata Usaha :**  
**Ali Arifin**

**Alamat Penerbit/Redaksi :**  
**Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)**  
**Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272**  
**SEMARANG – 50196**

Terbit Pertama kali : Juli 2002

## KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam, wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

## SOLUSI

Vol. 9 No. 1 Januari 2010

ISSN : 1412-5331

### DAFTAR ISI

1. Perbedaan Penggunaan *Discriminant Function* dengan *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA) dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi .....  
*Dyah Nirmala Arum Janie* 1 - 12
2. Pengaruh ROA, EPS, *Current Ratio*, DER dan Inflasi terhadap *Return Saham* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode Tahun 2006-2008)  
*Widyani Anik, Dian Indriana T.L.* 13 - 28
3. Pentingnya Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan .....  
*Ardiani Ika S* 29 - 40
4. Pengaruh *Procedural Justice* dan *Distributive Justice* terhadap Tingkat Eskalasi Komitmen dalam Penganggaran Modal dengan *Self Esteem* sebagai Variabel Intervening (Studi Eksperimen) .....  
*Andi Irfan* 41 - 47
5. Aplikasi Konsep Dasar Permintaan Pasar terhadap Pemasaran Produk (Studi Kasus Pemasaran Produk Televisi VCD) .....  
*Eay Suryawardana* 49 - 56
6. Identifikasi Indikator Penilaian Kinerja Karyawan untuk Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (Studi di Universitas Jenderal Soedirman dalam Rangka Perubahan Status menjadi Badan Layanan Umum 2010) .....  
*Irianing Suparlinah, Puji Lestari* 57 - 68
7. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah .....  
*Unun Dian Anggraeni, Yohanes Suhardjo* 69 - 81
8. Efisiensi Market dan Implikasinya .....  
*Dian Indriana T.L.* 83 - 93
9. Upaya Mempertahankan UMKM di Tengah Persaingan CAFTA .....  
*Evi Nurhidayati, Andy Kridasusila* 95 - 101
10. Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia Menghadapi ACFTA .....  
*Dian Prawitasari* 103 - 108

### PEDOMAN PENULISAN NASKAH

# Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia Menghadapi ACFTA

Oleh :  
Dian Prawitasari  
Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang

## pendahuluan latar Belakang

Perdagangan internasional antar negara semakin lama semakin diperlukan oleh semua negara. Tidak ada satu negarapun yang mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Walaupun negara mampu lebih baik dari negara lain dalam menghasilkan beberapa barang, menurut David Ricardo (Henry Simamora, 2007) negara bersangkutan haruslah hanya memproduksi apa yang paling baik yang dapat dihasilkannya. Disamping berkonsentrasi dalam menghasilkan produk yang semakin baik, dibutuhkan oleh masyarakat global dan dapat bersaing, suatu negara juga dihadapkan pada upaya melindungi pasar di dalam negeri dari serbuan produk negara lain. Proteksi pasar dilakukan dengan harapan produk dalam negeri dapat terserap di pasar, bukannya mengkonsumsi produk negara lain. Kenyataannya, proteksi yang dilakukan untuk menghambat masuknya produk negara lain, sulit untuk dipertahankan.

Salah satu kebijakan perdagangan internasional, hambatan yang sering diterapkan oleh pemerintah adalah hambatan atas dasar harga, batasan kuantitas, penetapan harga internasional, hambatan nontarif, batasan finansial, pengawasan investasi asing dan tarif. Pilihan yang diambil tentu saja disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Dengan berkembangnya tuntutan pasar global yang tidak ada batas, muncul kesepakatan-kesepakatan antar negara untuk bertahan dalam persaingan perdagangan internasional yang semakin ketat. Salah satunya adalah integrasi ekonomi berupa kawasan perdagangan bebas (*free trade area*). Kawasan perdagangan bebas adalah suatu perjanjian integrasi ekonomi dimana hambatan perdagangan (seperti tarif dan kuota) diantara Negara-negara anggotanya dihapuskan. Kawasan perdagangan bebas merupakan bentuk integrasi ekonomi yang paling tidak restriktif dan paling longgar. Di bawah perjanjian ini, setiap partisipan akan berupaya untuk memetik keuntungan komparatif negara tersebut dan mengimpor barang dan jasa yang menjadi kelemahan komparatifnya. Setiap anggota tetap mempertahankan hambatan perdagangannya terhadap negara bukan anggota.

Negara yang tidak bergabung dengan kawasan perdagangan bebas seperti ini diuntungkan dengan mendapatkan keuntungan finansial dari tarif ataupun kuota yang diberlakukan. Pada kenyataannya, negara tersebut akan menghasilkan produk yang tidak kompetitif, berbiaya tinggi dan perkembangan industrinya akan terhambat, karena akan mendapatkan balasan dari negara lain berupa proteksi masuk ke pasar negara lain tersebut. Kerjasama kawasan perdagangan bebas menjadikan setiap negara partisipan harus siap dengan sektor-sektor industri yang diharapkan akan mampu menopang negara tersebut untuk masuk ke negara lain yang menjadi anggota.

## tujuan dan Manfaat

ACFTA merupakan kawasan perdagangan bebas yang meliputi negara-negara anggota ASEAN dan China yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2010. Kawasan perdagangan bebas ini diharapkan memberikan keuntungan terutama pada konsumen dengan banyak macam produk dan harga yang lebih murah. Disamping itu, kawasan perdagangan bebas akan menjadikan negara produsen dapat mencapai skala ekonomis dikarenakan pasar potensial yang sangat besar. ASEAN dengan anggota 10 negara (Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Brunei, Filipina, Vietnam dan Laos) jumlah penduduknya diperkirakan 560 juta jiwa, sedangkan China diperkirakan jumlah penduduknya 1,3 milyar jiwa. Pasar yang demikian besar dan menjadi incaran banyak negara lain, akan memberikan keuntungan bagi negara ASEAN maupun China jika mampu memanfaatkan perdagangan bebas tersebut semaksimal mungkin. Total Produk Domestik Bruto dari danya ACFTA diperkirakan US \$ 5,8 triliun dengan total perdagangan pada tahun 2010 diperkirakan US \$ 200 milyar.

## Pasar Manufaktur

Liberalisasi perdagangan akan terus bergulir dan perlu direspon secara tepat. Pada awalnya, liberalisasi perdagangan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan sekaligus untuk mewujudkan suatu tatanan perdagangan yang lebih adil. Sampai dengan akhir tahun 1980-an, tingkat distorsi perdagangan dan industri sudah demikian mengkhawatirkan sehingga telah menimbulkan kerugian secara global (*social loss*) yang demikian besar. Berbagai putaran pertemuan sudah dilakukan untuk mengoreksi distorsi tersebut, sampai dengan ditandatangani Putaran Uruguay yang selanjutnya akan diperbaharui melalui Putaran Doha.

Berbagai kepentingan, khususnya aspek sosial dan politik telah membuat upaya peningkatan efisiensi perdagangan dan industri serta menciptakan tatanan perdagangan produk pertanian yang lebih adil, belum dapat sepenuhnya terwujud. Walaupun berbagai komitmen telah disepakati melalui Putaran Uruguay, berbagai upaya untuk melindungi kepentingan masing-masing negara masih tetap berjalan, walau dengan intensitas yang menurun. Dengan tingkat distorsi, komitmen, serta konsistensi dalam implementasi yang bervariasi antara komoditi perkebunan dan antara negara, dampak dari liberalisasi perdagangan juga bervariasi antar komoditi perkebunan dan negara. Secara umum, pelaksanaan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan harga. Dampak terhadap produksi, konsumsi, dan perdagangan bervariasi tergantung komoditas. Negara produsen yang efisien akan memperoleh manfaat yang lebih besar, sedangkan negara *net* -importir akan menderita kerugian akibat liberalisasi perdagangan.

Kawasan perdagangan bebas menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang produknya tidak dapat bersaing berikut pekerja yang harus menganggur karena perusahaannya kalah bersaing. Penerimaan pemerintah dari tarif juga berkurang drastis. Oleh karena itu tugas pemerintah adalah mendorong perusahaan yang dapat memenangi persaingan dan memberikan jalan keluar serta alternatif bagi perusahaan yang kalah bersaing dan pekerja yang menganggur.

Pelaksanaan ACFTA yang ditunda untuk waktu tertentu bagi produk-produk tertentu, pada akhirnya menjadikan konsumen dirugikan karena harus membayar produk dengan harga lebih mahal dan perekonomian menjadi tak berkembang. Selain itu, negara mitra perdagangan bebas kemungkinan besar akan melakukan pembalasan. Perdagangan bebas harus disikapi dengan realistis.

Perkembangan ekonomi China sepertinya tak akan terbendung untuk menjadi perekonomian terbesar di dunia dalam dua atau tiga dekade ke depan. Harga produk yang murah dan jenis produk yang bervariasi serta dukungan penuh pemerintah China membuat produk negara lain sangat sulit untuk bersaing. Pemerintah Amerika Serikat pun pada mulanya berupaya melindungi perekonomian dalam negerinya dan berusaha menekan China, antara lain untuk membiarkan mata uang renminbi menguat dan mengurangi surplus perdagangan. Dalam perkembangannya, AS harus realistis bahwa China tidak lagi dapat ditekan dan lebih baik bekerja sama dalam memajukan perekonomian dunia dari krisis global. Perusahaan-perusahaan AS, Eropa dan Jepang tidak hanya melakukan investasi di China, tetapi juga melakukan aliansi strategis.

Bagi Indonesia, pendekatan realistis lebih baik ditempuh daripada mencegah atau menghindari persaingan dengan produk China. Indonesia punya kekuatan dalam SDA dan produk-produk berbasis SDA. Bahkan, produk-produk yang bersaing langsung dengan China, seperti tekstil, garmen dan alas kaki, tak semua jenis kalah dalam persaingan. Produk-produk tertentu tetap dapat bersaing, apalagi jika produk tersebut mempunyai keunikan Indonesia.

China melihat Indonesia sebagai pemasok penting bahan mentah dan pasar yang besar bagi produk manufaktur, apalagi ditambah dengan Negara ASEAN lain. Indonesia defisit 3,2 milyar dollar AS dalam perdagangan dengan China. Defisit ini terutama bersumber dari perdagangan nonmigas, mencapai 4,6 milyar dollar AS. Diperkirakan defisit ini akan membesar karena defisit perdagangan nonmigas sangat sulit tertutupi oleh surplus dari migas. Indonesia harus semakin meningkatkan ekspor berbasis sumber daya alam, baik pertanian maupun pertambangan, untuk mengurangi defisit perdagangan. Keunggulan produk-produk China lebih ditentukan oleh harga yang murah, belum pada kualitas, kandungan teknologi dan kekhususan lain. Keunggulan harga murah ini akan semakin merosot karena semakin tingginya upah tenaga kerja.

Pendekatan realistis berarti, bagi produk-produk yang dapat bersaing dan diproduksi perusahaan Indonesia dalam perdagangan bebas dapat difasilitasi lebih lanjut untuk lebih kompetitif. Bagi perusahaan yang lebih terbuka juga dapat melakukan aliansi strategis dengan perusahaan China atau perusahaan asing lain untuk memanfaatkan perdagangan bebas ini dengan pasar yang demikian

besar lebih dari 1,8 milyar penduduk. Kunci persaingan yang harus dibuat Indonesia adalah mempercepat perbaikan struktur biaya produksi yang merupakan titik lemah dunia usaha Indonesia, termasuk di dalamnya soal penurunan suku bunga, biaya energi, biaya transportasi, yang selama ini dicap biang keladi penyebab mahalnya biaya berbisnis di Indonesia. Belum lagi soal produktivitas, birokrasi dan serbuan barang illegal.

Kekuatan ekonomi akan bergeser dari AS dan Eropa Barat ke Asia. China dan India akan menjadi penggerak utama pertumbuhan. Indonesia juga berpotensi untuk menjadi besar perekonomiannya di Asia bila dapat memperbaiki iklim investasi dan melakukan revitalisasi industri, pertanian dan pertambangan.

### **Kondisi Perekonomian dan Keunggulan Komparatif Indonesia**

Indonesia telah memulai proses pemulihan dari krisis ekonomi yang menimpa pada tahun 1998. Data-data statistik menunjukkan hal ini, dimana indikator PDB meningkat dari Rp 1.389 trilyun di tahun 2000 menjadi Rp 2.303 trilyun di tahun 2004. Secara tidak langsung, hal ini didukung oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang meningkatkan jumlah dan nilai ekspor netto Indonesia. Jika kita memperhatikan struktur produksi Indonesia dalam periode 2000-2004, dapat dilihat bahwa kontributor terbesar pada PDB Indonesia adalah sektor industri dan jasa, dengan sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 15,4 % terhadap PDB di tahun 2005. Namun dari sisi lain, ternyata sebagian besar pekerja di Indonesia berada di sektor pertanian, dimana pada tahun 2005 jumlahnya mencapai 41 juta orang. Selain itu, menurut data-data dari World Bank, sampai saat ini masih terdapat sekitar 110 juta orang yang hidup dengan pendapatan dibawah US\$ 2 per harinya di Indonesia, dan 2/3 dari jumlah tersebut berada di daerah pedesaan yang notabene tergantung pada sektor pertanian. Implikasi dari fakta-fakta diatas yaitu walaupun sebagian besar PDB Indonesia disumbangkan oleh sektor industri dan jasa, dimana kedua sektor tersebut juga memberikan produktivitas nilai tambah terbesar, namun masih banyak penduduk Indonesia yang berada di sektor pertanian yang seringkali dipandang sebagai suatu *sunset industry*. Implikasi lainnya adalah rendahnya produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan dan juga rendahnya produktivitas serta nilai tambah dari para pekerja yang ada di sektor tersebut. Dari sisi perdagangan, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan Indonesia sudah terbuka terhadap perdagangan internasional. Robilliard & Robinson (2005) menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indonesia memiliki level tarif *cross-sectoral* yang cukup rendah, dengan rata-rata sekitar 7 persen. Selain itu, lebih dari 90 persen tarif di Indonesia sudah masuk dalam kategori *bound tariff* dan *applied tariff*-nya jauh lebih rendah. Sementara itu Indonesia juga tidak memiliki kuota tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya, kecuali batasan impor untuk produk sensitif seperti beras dan gula. Kontribusi sektor perdagangan internasional sendiri meningkat setiap tahunnya dan beberapa produk ekspor utama Indonesia adalah produk mineral, mesin-mesin dan alat listrik, plastik dan karet, serta plywood. Sementara produk-produk impor listrik, serta produk kimia. Selain itu, mitra dagang utama Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat (AS), Singapura, Korea Selatan dan Cina.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia sampai saat ini berada di sektor industri dan perkebunan, sementara walaupun kontribusi sektor jasa terhadap PDB cukup besar namun hal itu belum dapat dijadikan komoditas ekspor. Namun ternyata Indonesia masih tergantung pada bahan tambang, sebagai komoditas utama ekspor dan impor, yang mana hal ini harus menjadi perhatian ke depannya.

### **Beberapa Tantangan Lainnya**

Tantangan utama bagi Indonesia saat ini adalah mengenai ketersediaan data di dalam negeri. Hal ini amat penting untuk mengetahui keunggulan dan potensi Indonesia. Tantangan lain yang harus dihadapi berkenaan dengan koordinasi lintas sektor, dimana penanganan komoditas-komoditas perdagangan Indonesia saat ini berada di beberapa departemen yang berbeda. Contohnya adalah penanganan minyak dan hasil tambang yang berada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, komoditas pertanian dan perkebunan yang berada di Departemen Pertanian, dan jasa-jasa yang ditangani oleh berbagai departemen terkait. Sarana koordinasi antar departemen di Indonesia harus lebih diefektifkan terutama dalam pengambilan keputusan mengenai posisi Indonesia. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap keberadaan perdagangan bebas saat ini masih rendah. Para pengusaha dan *stakeholders* lainnya belum menyadari mengenai manfaat dari

perdagangan bebas yang didasarkan pada aturan sistem multilateral, sehingga mereka masih mengharapkan adanya proteksi terhadap pasar Indonesia.

Tantangan utama bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana meningkatkan kesiapan Indonesia di dalam negeri dalam menghadapi ACFTA ke depan. Untuk itu, kiranya perlu untuk mengetahui potensi dalam negeri terlebih dahulu serta tantangan yang akan dihadapi ke depannya untuk menyusun skala prioritas dalam ACFTA, sehingga pasar Indonesia tidak akan termanfaatkan oleh egera partisipan ACFTA dan Indonesia pun mampu memanfaatkan pasar negara partisipan ACFTA.

### Kesiapan Indonesia Menghadapi ACFTA

Program penurunan tarif bea masuk ACFTA pada tahap I (*Early Harvest Program*) dilakukan bertahap mulai 1 Januari 2004 dan menjadi 0 % pada 1 Januari 2006. Pada tahap II (Normal track I dan II) dimulai 20 Juli 2005 dan menjadi 0 % pada tahun 2010 (Normal track I) dengan fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0 % pada tahun 2012 (Normal track II). Tahap III (*Sensitive/Highly Sensitive List*) penurunan tarif mulai tahun 2012 dengan penjadwalan maksimum tarif pada tahun 2012 adalah 20 % dan akan menjadi 0 – 5 % mulai tahun 2018 (Produk *Sensitive List*), sedangkan penurunan tariff pada tahun 2015 dengan maksimum tariff bea masuk pada tahun 2015 sebesar 50 % (Produk *Highly Sensitive*). Seharusnya sosialisasi adanya ACFTA dan kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi disampaikan pemerintah kepada pelaku bisnis. Sektor industri Indonesia yang menyatakan belum siap adalah :

1. Sektor tekstil
2. Makanan dan minuman
3. Petrokimia
4. Alat-alat dan hasil pertanian
5. Alas kaki
6. Sintetik Fiber
7. Elektronik (kabel, peralatan listrik)
8. Industri permesinan
9. Jasa engineering dan sektor lain yang terkena dampak
10. Besi dan baja
11. Industri komponen manufaktur otomotif

Kesiapan Indonesia untuk memanfaatkan ACFTA, terutama dengan China yang mempunyai pasar potensial sangat besar, harus ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memerlukan koordinasi antar departemen. Dengan demikian, arah peningkatan perdagangan internasional melalui kawasan perdagangan bebas yang dilakukan perusahaan Indonesia dapat mencapai hasil yang maksimal. Indikator-indikator mengenai perbandingan Indonesia dengan China adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan sejumlah indikator

INDIKATOR	Indonesia	China
Jumlah penduduk	240,3 juta jiwa	1,34 milyar jiwa
Pertumbuhan penduduk	1,14%	0,66 %
PDB Per Kapita	4.000 dollar AS	6.500 dollar AS
Angkatan kerja	113,3 juta jiwa	812,7 juta jiwa
Tingkat pengangguran	7,7 %	4,3 %
Inflasi	5 %	- 0,8 %
Suku bunga kredit bank komersial	13,6 %	5,31 %
Pertumb. Produksi Industri	2 %	8,1 %
Panjang jalan raya	391.009 km	3,6 juta km
Panjang jalan tol	772 km	53.913 km
Produksi listrik	134,4 miliar Kwh	3,451 triliun kWh
Konsumsi listrik	119,3 miliar kWh	3,438 triliun kWh

Sumber : Kompas, 2010

China mempunyai kesiapan infrastruktur dan energi yang mendukung pertumbuhan produksi industrinya hingga 8,1 %. Angkatan kerja sebanyak 812,7 juta jiwa menjadi modal yang sangat berharga bila bisa dimanfaatkan dengan baik. Sektor industri juga didukung oleh suku bunga kredit bank komersial yang rendah dan pengusaha China kebanyakan melakukan pinjaman dengan jangka panjang, sehingga beban lebih rendah yang pada akhirnya mampu menekan harga produk China.

Konsumsi produk China

Produk	Prosentase
Elektronik	34 %
Telepon seluler	19 %
Mainan anak	11,1 %
Alat rumah tangga (non elektronik, alat teknik)	9,9%
Pakaian/produk tekstil	9,3 %
Kosmetik dan obat-obatan	6,5 %
Tas & sepatu	2,9 %
Alat transportasi	2,2 %
Komputer dan perlengkapannya	1,3 %
Lainnya	3,8 %

Sumber : Kompas, 2010

Keterbukaan Indonesia terhadap perdagangan internasional dan kontribusi dari perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia merupakan suatu nilai tambah yang harus dimanfaatkan. Sekiranya Indonesia sudah dapat memetakan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat diperdagangkan serta dapat menyetujui posisi untuk sektor-sektor tersebut.

Pada saat ini, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengambil posisi ofensif di bidang jasa misalnya keperawatan, konstruksi, perbankan serta energi. Namun tentunya tidak boleh dilupakan bahwa Indonesia juga harus memperoleh *policy space* yang cukup sehingga dapat menjaga kepentingan Indonesia ke depannya, khususnya di sektor pertanian dimana masih banyak penduduk Indonesia yang tergantung pada kontinuitas stabilitas di sektor ini. Oleh karenanya dalam menentukan posisi Indonesia juga harus dicari keseimbangan yang tepat di tiap-tiap bidang sehingga tidak ada sektor-sektor yang terlupakan ataupun terkorbankan.

### Kesimpulan

Prioritas utama bagi Indonesia dalam menghadapi ACFTA adalah membenahan kondisi dalam negeri di berbagai sektor dan lintas sektoral terutama dalam masalah koordinasi dan struktur pengambilan keputusan. Beberapa poin penting yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan membenahan dalam pengumpulan data-data statistik seperti dalam hal produksi, konsumsi, nilai tambah, ekspor dan impor merupakan modal utama bagi suatu negara untuk mengetahui potensi ekonominya dan amat berguna dalam penyusunan kebijakan yang tepat. Dengan tersedianya data sah yang dapat dianalisa, Indonesia dapat memperkirakan dan menyusun prioritas kepentingannya ke depan terutama terkait dengan negosiasi mengenai ACFTA. Sampai pada batas-batas tertentu, hal ini telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan, namun hal ini harus didukung oleh departemen-departemen teknis lainnya karena masih banyak sektor yang belum terklasifikasi. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber informasi utama dapat diberdayakan sebagai *focal point* untuk pengumpulan data agar dapat menyediakan masukan data yang berguna, mengingat BPS telah memiliki sarana dan prasarana yang tepat untuk mengumpulkan data-data tersebut.
2. Menciptakan kebijakan ekonomi domestik yang dapat mengoptimalkan keunggulan komparatif Indonesia, meningkatkan nilai tambah dan sekaligus juga meningkatkan produktivitas di berbagai sektor terutama pertanian. Komponen utama dalam hal ini adalah sistem pendidikan yang baik dan dapat mendorong peningkatan kapasitas pekerja Indonesia. Selain itu juga dibutuhkan untuk menciptakan suatu struktur insentif yang efektif untuk mendorong terjadinya realokasi sumber

- daya, baik manusia maupun modal. ke sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif terutama jasa, mengingat bahwa Indonesia memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena membutuhkan usaha yang keras, biaya yang tidak sedikit, dukungan dan kemauan politik, serta baru dapat dilihat hasilnya setelah beberapa waktu. Namun hal ini dapat mengurangi kerentanan pekerja Indonesia terhadap pergerakan yang mungkin terjadi di perekonomian global yang mungkin terjadi ke depannya, terutama jika hal itu merugikan Indonesia.
3. Menyusun struktur koordinasi dan kewenangan serta sistem informasi yang efektif, efisien, tepat waktu dan tepat guna antar-departemen. Keterlibatan berbagai departemen dalam proses penyusunan kebijakan berkenaan dengan ACFTA bukanlah merupakan suatu kendala yang harus dipermasalahkan dan sebaliknya harus lebih diefektifkan mekanisme kerjanya agar dapat menyusun skala prioritas. Hal ini harus dilakukan karena tiap departemenlah yang mengetahui keunggulan dan kelemahan tiap-tiap sektor. Melalui sistem koordinasi yang baik dan peningkatan intensitas diskusi di dalam negeri, sekiranya dapat menjadi cara untuk menyelaraskan persepsi bersama sehingga dapat disusun suatu kerangka posisi Indonesia dalam menghadapi ACFTA.
  4. Mengikutsertakan para *stakeholders* seperti LSM, akademisi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dalam proses diskusi mengenai ACFTA dan implikasinya untuk Indonesia. Selain dapat digunakan sebagai sarana diseminasi informasi dan peningkatan kesadaran mengenai ACFTA, kesempatan ini juga dapat digunakan untuk memperoleh masukan yang berguna bagi penyusunan kebijakan dalam menghadapi ACFTA. Sementara untuk menghadapi kemungkinan terjadinya *external shocks* yang negatif di perekonomian global, sebaiknya Indonesia mulai melihat alternatif-alternatif yang tersedia khususnya dalam mencari mitra dagang non-tradisional dan berpartisipasi dalam berbagai *bilateral & regional trade arrangements*. Hal ini dapat berguna untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap pengaruh dari pergerakan negatif di perekonomian global dengan memiliki basis perdagangan yang lain.
  5. Pemerintah perlu mempersiapkan strategi untuk meningkatkan daya saing guna menghadapi serbuan produk impor, khususnya dari China, pasca Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menekan biaya bunga perbankan. Disamping itu juga penguatan daya saing produk lokal, melalui pembenahan infrastruktur dan energi, serta pemberian insentif bagi perusahaan industri strategis.

#### **Daftar Pustaka :**

**Boediono.1997. Ekonomi Internasional. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.**

**Henry Simamora, 2007, Manajemen Pemasaran Internasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta**

**Nurgiyanto. 1995. Pengantar Perdagangan Internasional. Fasindo, Semarang**

**Santoso,Thomas.1996. Ekonomi Internasional. Ghalia Indonesia, Jakarta**

**Soegiyono. 1995. Ekonomi Internasional. Fajar Pustaka, Yogyakarta**

**Robilliard, Anne-Sophie & Sherman Robinson, 2005, the Social Impact of a WTO Agreement in Indonesia, World Bank Policy Research Working Paper 3747, October, [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)**